

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Helmy Fuady, 2002. *Memahami Anggaran Publik*. Yogyakarta : Idea Press,

Alamsyah. 1997. *APBD Dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Rineka Jaya

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi V)*.
Rineka Cipta, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008),

Djohan Djohermansyah, 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hans Kelsen, 2009. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia

HAW, Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, cet. II, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002)

Horas, Benny.2008. *Buku Pintar Calon Anggota Dan Anggota Legislatif*. Jakarta :Transmedia
Pustaka

Inosentius Syamsul, 2002. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Adekasi, Jakarta

Josef Riwu Kaho, 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cet. II, Jakarta:
Rajawali Pers.

Juanda, 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD
dan Kepala Daerah*

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan
Kepala Daerah*

Kaloh, 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Prilaku Kepala
Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Pertama

Kartiwa.2006. *Implementas Dan Peran DPR*.Jakarta:Yudistira

Komarudin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: UIN
Press

Modjo.2004. *Pemanfaatan APBD Untuk Kepentingan Daerah*. Jakarta : Gramedia

Ni Matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media. Bandung.

Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Tangerang: PT. Pustaka Mandiri, 2010), cet.
Pertama

P. Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Pratek*, cetakan Pertama, Jakarta: PT.
Renika Cipta,

Puthot Tunggal dan Pujo Adhi Suryani. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Giri Utama.
Surabaya.

Robinson. 2006. *Dasar Kebijakan Publik*.Yogyakarta.UGM Pres:

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, cet. III, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2001)

Sopannah, *Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggran*.Jakarta : Bumi Aksara.2004

Sugiyono, 2009, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan edisi ke 9, Alfabeta, Bandung

Sunarso.2005. *Pengeloaan Keuangan Negara*: Jakarta: Yudistira

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019 ;

Peraturan DPRD Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD.

Jurnal

Aminuddin . Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

(Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako)

Nirmala, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penggunaan Anggaran Bidang

Infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara

Internet

<http://dahnilsitorus.blogspot.com/>

